

Ancaman Kegagalan Demokratisasi di Indonesia: Identifikasi Hambatan dan Tantangan di era Reformasi

Mauludy Nugraha

Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan sebuah identifikasi mengenai ancaman kegagalan demokratisasi di Indonesia yang mana dewasa ini masih menjadi sorotan bagi para akademisi, mahasiswa, dan pengamat politik. Perlu kita ketahui kegagalan secara struktural pemerintahan orde baru mendorong fase transisi menuju demokrasi secara utuh dan penuh esensi yang ditandai dengan gerakan *people power*. Namun, agenda besar ini mendapatkan halauan dan gangguan oleh pihak yang mencoba mengakomodir demokratisasi di Indonesia. Hambatan dan tantangan terus menjadi pekerjaan rumah seluruh elemen masyarakat di Indonesia, seperti feodalisme yang masih mengakar kuat dalam diri masyarakat Indonesia, kelompok minoritas belum mendapatkan hak dan representasi secara maksimal, dan rendahnya partisipasi perempuan didalam kursi parlemen. Dengan demikian, perlu ada sebuah tindakan untuk mengatasi permasalahan yang menjadi hambatan agenda besar tersebut, dalam hal ini penulis mencoba merangkum solusi tersebut diantaranya, advokasi kepada kaum perempuan, pendidikan politik, kebijakan untuk perlindungan minoritas, dan maksimalisasi gerakan akar rumput perempuan dan minoritas yang berfokus pada intensivitas politik terutama untuk membawa kepentingan perempuan dan minoritas kedalam sebuah parlemen.

Kata kunci: Demokratisasi, Feodalisme, Minoritas, dan Partisipasi Perempuan

PENDAHULUAN

Kehancuran rezim orde baru membawa harapan baru bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Pasca peristiwa *people power* 98 yang berhasil menggulingkan pemerintahan orde baru maka babak baru demokrasi dimulai, transisi perubahan secara signifikan pun terjadi, seperti munculnya partai politik baru, kebebasan pers, dan kekuatan militer hilang secara perlahan.

Narasi kebebasan dan demokrasi secara utuh mulai diperkenalkan pada publik. Dalam hal ini muncul basis argumentasi mengenai bagaimana seharusnya demokrasi berjalan, tidak hanya sekedar prosedural, tetapi penuh dengan substansial. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya menghilangkan kesalahan doktrinisasi yang dilakukan orde baru kepada masyarakat khususnya mengenai demokrasi. Mengingat pada masa pemerintahan Suharto masyarakat selalu berada dalam bayang militer dan ketakutan sehingga sangat jauh dari nilai dan esensi demokrasi.

Demokrasi adalah sebuah pemahaman tentang jawaban atas respon ketidakadilan yang dilakukan kerajaan atau absolutisme kepada masyarakat sipil maka tidak heran demokrasi menjadi indikator keberhasilan suatu negara di era modern. Sementara itu, Aristoteles menekankan pemahaman demokrasi tentang kebebasan mengenai dalam arti lain ia percaya dengan kebebasan manusia bisa berbagi kekuasaan. Sementara itu, ciri khas negara demokrasi ialah dengan

memberikan hak yang sama untuk berpendapat dan berserikat sesuai dengan peraturan yang ada baik dalam aspek politik, ekonomi, hukum, dan sosial (Masdar Hilmy, 2015)

Demokratisasi mulai digulirkan dan berproses demi memenuhi indikator negara demokrasi. Hal tersebut dinilai menjadi sebuah kewajiban untuk menciptakan sistem politik sehat. Dalam hal ini sebagai suatu sistem politik, demokrasi menjadi stratum teratas yang diterima oleh negara karena dianggap mampu mengatur dan menyelesaikan permasalahan sosial politik, baik secara kelompok atau individu (Nugroho, 2015). Berdasarkan kebutuhan suatu negara dalam menyelesaikan permasalahan, seperti ketimpangan, kemiskinan, dan ancaman otoriter maka demokrasi hadir membawa harapan dan pedang untuk mengurangi masalah klasik dalam sebuah negara.

Demokrasi dinilai sebagai sistem terbaik didunia saat ini, maka tidak heran demokrasi dianggap sebagai altar tertinggi manusia menggantungkan hidupnya terutama perihal kesejahteraan. Namun, pasca gerakan sosial yang terjadi di Indonesia sejatinya demokratisasi belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Dalam hal ini masih banyak pihak yang mencoba menggagalkan kepentingan demokrasi di Indonesia. Memang secara faktual Indonesia sedang berproses perihal demokratisasi, tetapi diam-diam masih mengakomodasi para aktor yang berpotensi menggagalkan agenda besar ini,

mereka yang mencoba menggagalkan ialah anggota militer, pembangkang moderat yang berhasil mempertahankan organisasi sosioreligius dan partai politik serta aktor yang pro terhadap orde baru (Wicaksana, 2016).

Selama masa reformasi demokrasi di Indonesia sudah berjalan secara prosedural meskipun telah banyak kehilangan narasi dan basis substansial yang semestinya menjadi nilai utama dari demokrasi. Nilai tersebut ialah aktor politik yang mengimplementasikan nilai demokrasi, seperti berdebat dengan argumentasi yang rasional sebelum pemilu, politik tanpa uang, dan kebijakan pro rakyat serta penuh urgensi. Bahkan Aktor politik di Indonesia pun kerap melontarkan kerinduannya pada orde baru dan masih banyak aktor militer yang mengisi kursi pejabat publik. Oleh karena itu, demokratisasi yang hari ini diterapkan di Indonesia sebagai bukti negara demokrasi terancam mengalami kegagalan.

Demokratisasi di Indonesia sejauh ini terus berjalan dan berproses, tetapi kita perlu memahami esensi dan definisi mengenai demokratisasi. Ilmuwan Politik ternama, Olle Tornquist menyebutkan dengan mengutip dari konsep yang digagas oleh Guillermo O Donnell dan Philippe Schmitter mendefinisikan demokratisasi ialah proses dimana aturan prosedur kewarganegaraan diterapkan secara institusi politik yang sebelumnya diatur oleh prinsip misalnya pengawasan, tradisi sosial, penilaian ahli dan praktik administrasi, selain itu, dapat juga diperluas buta huruf, perempuan, pemuda, dan etnis minoritas lalu bisa juga mengenai Lembaga yang sebelum tidak tunduk pada warga negara menjadi tunduk, seperti militer, partisan, dan pendidikan (Tornquist, 2013)

Disisi lain, kita memahami berbicara mengenai demokratisasi maka kita akan berada dalam ruang lingkup bagaimana pengawasan antar lembaga terjadi yang berguna mencegah pemerintahan otoriter, mengingat dalam demokratisasi diidentikan dengan upaya pembagian kekuasaan atau desentralisasi dan trias politica. Selain itu, cerminan mengenai praktik administrasi yang dilakukan birokrat harus penuh transparansi dan jika perlu maka harus ada reformasi birokrasi sebagai bentuk memenuhi demokratisasi. Selanjutnya terdapat pendidikan politik menjadi prioritas untuk mencegah buta politik, kesetaraan gender, dan etnis minoritas mendapatkan pengakuan. Sementara itu ciri khas demokratisasi ialah militer masuk barak, militer tidak diperkenankan melakukan kekerasan kepada masyarakat sipil, dan

tradisi sosial tidak mengganggu jalannya demokratisasi.

Dalam tulisan ini bertujuan untuk menilai sejauh mana demokratisasi berjalan di Indonesia mengingat banyak pihak yang ingin mengakomodir hingga pasang surut demokrasi di Indonesia. Selain itu, tulisan ini mencoba mengidentifikasi hambatan dan tantangan seperti apa dalam demokratisasi terutama perihal ancaman kegagalan demokratisasi. Terakhir tulisan ini memiliki tujuan memberikan sebuah pemaparan secara komprehensif terkait demokratisasi sehingga kami mengambil judul "Ancaman Kegagalan Demokratisasi di Indonesia: Identifikasi Hambatan dan Tantangan di era reformasi"

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan atau kualitatif dengan mengumpulkan data dan sumber-sumber Pustaka yang berisi teori relevan dengan masalah dalam penelitian ini. Selain itu, penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data terpercaya yang bertujuan dengan objek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan masalah yang pada dasarnya bertumpu pada bahan Pustaka relevan. Adapun, sumber-sumber yang digunakan, seperti buku, jurnal ilmiah, referensi statistik, dan hasil penelitian dalam bentuk jurnal ilmiah dan sumber yang berasal dari internet. Dengan cara tersebut penulis tidak turun lapangan, tetapi mengandalkan sumber yang penulis sebutkan diawal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Demokratisasi di Indonesia dalam hal ini masih menjadi kajian menarik, terutama terkait keberhasilan atau kegagalan yang terjadi. Berdasarkan fenomena yang terjadi ada potensi atau ancaman mengenai kegagalan demokratisasi di Indonesia yang disebabkan oleh internal pemerintah Indonesia itu sendiri.

Logika konvensional berbicara mengenai tentang tujuan manusia dalam mencapai hidupnya, seperti kesejahteraan, kebebasan, dan kedamaian. Dengan demikian demokrasi menjadi sebuah inkubator mengenai kemajuan suatu bangsa. Seorang pemikir politik, Francis Fukuyama menekankan dalam sebuah karya fenomenalnya "The End of History" bahwa manusia telah mencapai fase akhir sejarah

dalam hidupnya, dengan arti lain tidak ada yang mampu menandingi demokrasi liberal dan ideologi tunggal (Fukuyama, 1989). Melalui argumentasi yang setidaknya menjadi basis fundamental mengenai doktrinisasi dan upaya negara pro demokrasi menyebar luaskan paham mengenai demokrasi ke negara seumur jagung dan Asia Afrika. Melalui penanaman tersebut Indonesia terkena doktrinisasi yang dibawa negara barat dan pro demokrasi, tetapi demokratisasi yang diterapkan di Indonesia seharusnya dilaksanakan kini mulai diakomodir, diganggu, bahkan digagalkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dalam hal ini penulis mencoba menjabarkan hambatan dan tantangan yang pada akhirnya mengindikasikan ancaman kegagalan mengenai implementasi demokrasi di Indonesia.

Feodalisme Masih Menghantui Masyarakat Indonesia

Dua puluh tahun lebih Indonesia mengalami fase transisi dari orde baru menuju reformasi. Dimana sebuah jawaban atas kesalahpahaman mengenai demokrasi, tetapi demokratisasi masa reformasi berjalan dengan baik meskipun masih banyak pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Demokratisasi masih menjadi momok menakutkan bagi perkembangan demokrasi di Indonesia, sifat tertutup dan menolak menerima pikiran liberalisasi dan sekularisasi menjadi akar penghambat menerapkan demokrasi. Pramodya Ananta Toer menegaskan bahwa masyarakat Jawa memiliki karakter feodalisme sebagai ketaatan membabi buat pada kekuasaan sehingga dalam hal ini masyarakat Jawa menghormati dan patuh kepada Raja atau Sultan sebagai penguasa dengan kedudukan raja dianggap kesucian (Kusmayadi, 2015). Mengingat masyarakat Indonesia banyak dihuni oleh suku Jawa maka akar feodalisme masih mengakar dengan ketidakpahaman mengenai demokrasi.

Feodal merupakan sebuah pemikiran terbelakang yang jauh dari kehidupan modern. Pemikiran feodal masyarakat Indonesia menghambat proses demokratisasi, melihat kebiasaan negara demokrasi, seperti kebebasan pers secara transparan, kekuasaan bukan suatu yang absolut dalam hal ini kritikan menjadi bentuk kecintaan terhadap demokrasi, dan kebebasan masyarakat menentukan pilihan. Feodalisme menyebabkan masyarakat enggan untuk menyampaikan permasalahan dan meminta perbaikan mengenai kebijakan

atau tindakan penguasa, dimana hal tersebut menjadi titik fundamental demokrasi, yaitu partisipatif masyarakat.

Berdasarkan nilai feodal yang masih menyangkut dimasyarakat Indonesia, secara hakikat mendorong masyarakat Indonesia bersifat kaku dan tidak kritis. Dalam hal ini pemahaman mengenai feodalisme menjadi sebuah catatan penghambat demokratisasi di Indonesia. Bahkan, masih banyak masyarakat Indonesia yang menggunakan pemahaman tentang kepatuhan "Samina Wa Athona", melalui ini segala sesuatu yang diperintahkan raja akan diikuti tanpa bantahan dan ketika tidak melaksana dianggap sebuah perbuatan dosa. Hal ini mirip dengan situasi Brazil pasca awal terkena doktrinisasi demokrasi oleh Amerika Serikat dengan adanya kekuatan politik lokal yang mendorong masyarakat mengikuti arahan dan perintah satu orang salah satunya pemuka agamawan. Keberadaan feodalisme dalam ruang lingkup demokrasi dan kehidupan modern mengikis dan menghambat proses demokrasi yang seharusnya berkembang secara berkelanjutan. Hal tersebut dibuktikan dengan masyarakat Indonesia yang mudah diarahkan karena kecintaan dan fanatisme buta pada raja dan pemimpin mereka sehingga dalam hal ini menghilangkan nalar dan substansi yang dibawa oleh sistem terbaik didunia saat ini, yaitu demokrasi.

Logika Mistika masih mengikat masyarakat Indonesia sekalipun agama masuk, kenyataannya masih banyak masyarakat kehilangan akal untuk berpikir jernih akibat nilai feodal sebagai contoh ialah larangan untuk melawan yang lebih tua. Dewasa ini kaum santri, priyayi, dan abangan masih memiliki pandangan kosmologi yang sama dengan keberagaman puritan (Syamsul Bakri, 2014). Oleh karena itu, feodalisme harus segera mungkin dihapuskan dalam ranah perpolitik di Indonesia, hal tersebut diinisiasi dapat membantu proses demokratisasi agar masyarakat sipil berperan aktif tanpa ada rasa takut terhadap budaya yang mengikat atau sebuah larangan. Tantangan mengenai penghapusan secara total feodalisme harus menjadi sebuah inkubator dan tujuan utama agar demokrasi berjalan secara optimal salah satunya dengan pendidikan politik untuk masyarakat sipil tidak takut untuk mengkritik dan melakukan penolakan terhadap kebijakan pemerintah. Namun, disisi lain elit politik perlu sadar pentingnya menghapus feodalisme didalam tubuh masyarakat Indonesia, mengingat feodal tidak hanya dibentuk oleh sejarah dan kebudayaan masa

lalu, tetapi infrastruktur negara terhadap aktor politik yang ada.

Hak dan Representasi Minoritas di Indonesia belum Maksimal

Esensi dari sebuah negara demokrasi ialah menghargai dan menganggap masyarakat secara sama dan utuh tanpa melihat perbedaan secara latarbelakang dan identitas. Mengingat kelompok minoritas dianggap sebagai entitas sosial yang tidak dapat dinafikan keberadaannya. Begitu pun, secara politik entitas sosial tersebut perlu mendapatkan pengakuan dari negara.

Sementara itu di Indonesia kelompok minoritas belum mendapatkan tempat dan hak sebagaimana mestinya. Berdasarkan data pada tahun 2013, Dilansir dari *ylbhi.or.id*, menyebutkan bahwa perlindungan hukum kaum minoritas masih lemah tercatat di Jawa Barat terjadi 23 kasus intoleransi terhadap kelompok minoritas. Selanjutnya berdasarkan hasil survei Wahid Foundation yang dilansir dari *medcom.id* tren intoleransi Indonesia meningkat dari 46% menjadi 54 %. Dalam survei nya intoleransi tersebut meliputi larangan pendirian tempat ibadah, polarisasi politik, dan politik identitas. Bahkan data yang dirilis oleh Setara Institute menyebutkan sepanjang tahun 2014-2020 pelanggaran kebebasan beragama didokumentasikan dengan menunjukkan angka konstanta sebanyak 180-200 peristiwa setiap tahunnya. Dalam hal ini mengindikasikan demokratisasi di Indonesia terancam oleh kasus intoleransi dimana minoritas kehilangan hak dan tempat aman mereka tinggal.

Kurangnya kesadaran akan pentingnya melakukan demokratisasi total menyebabkan pemahaman terkait demokrasi dengan menggunakan suara terbanyak sehingga masyarakat cenderung melakukan intimidasi terhadap minoritas, kegagalan berpikir dan rasa etnosentrisme yang tinggi menimbulkan corong intoleransi. Hilangnya hak minoritas disini menjadi tanda hambatan mengenai demokratisasi dimulai, hal tersebut terjadi karena kurangnya kesadaran politik dan buta politik. Tensi politik yang panas mendorong masyarakat mudah terpolarisasi atas dasar identitas sehingga hak minoritas hilang akibat aktivitas mayoritas. Bahkan politik identitas cenderung dilakukan oleh aktor politik untuk melakukan inklusi dan eksklusif sebagai strategi memenangkan pemilu.

Kelompok minoritas harus menjadi perhatian khusus dalam menyelesaikan agenda besar ini. Pemberian rasa aman

terhadap minoritas menjadi bagian penting dalam demokratisasi. Minoritas harus mendapatkan hak yang sama baik dalam hal ekonomi, sosial, dan politik. Oleh karena itu, kelompok minoritas perlu mencatatkan dirinya sesuai dengan nawacita demokrasi menciptakan politik yang demokratis. Sementara itu, hal yang menyebabkan representasi minoritas belum terpenuhi ialah keputusan minoritas tidak berpartisipasi dalam ritual demokrasi didalam entitas wilayah mereka (Nasution, 2013). Perlu ada sebuah refleksi menyeluruh ketidaktertarikan masyarakat minoritas untuk terjun kedalam politik, Disisi lain, ada salah satu indikasi alasan kelompok minoritas tidak ikut melakukan ritual demokrasi, seperti menjadi pemimpin di domisili mereka disebabkan trauma akan konflik atau peristiwa yang terjadi pada diri mereka. Mengingat dalam hal ini konflik tidak hanya disebabkan perihal kepentingan politik, tetapi sudah masuk kedalam ranah agama. Sebagai contoh ialah peristiwa penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Thahaja Purnama, secara langsung kasus yang menyimpannya tidak hanya sekedar unsur agama, tetapi ada upaya untuk menggagalkan saudara BTP menjadi Gubernur DKI Jakarta, mengingat tensi politik sedang memanas saat kejadian tersebut.

Melalui identifikasi hambatan proses demokratisasi di Indonesia maka sudah semestinya minoritas mendapatkan hak hidup aman dan berpolitik. Dalam arti lain aktivitas politik tidak boleh berdasarkan identitas, tetapi kualitas dan rasionalitas yang dimiliki seseorang. Penulis percaya tantangan yang dihadapi seluruh elemen yang serius mengawal proses demokratisasi ialah kesiapan dan sikap mayoritas menerima perbedaan.

Sementara itu, tantangan mengimplementasikan perlindungan hak terhadap minoritas menjadi sebuah catatan yang perlu diperjuangkan demi keberlangsungan demokratisasi di Indonesia. Representasi minoritas yang berada dalam parlemen atau perwakilan politik harus membawa isu krusial terutama mengenai hak minoritas. Dengan demikian, ketika perlindungan dan rasa aman telah tercipta maka kelompok minoritas akan masuk kedalam agenda atau rencana integrasi Indonesia dan kelompok mayoritas bersedia mengakomodasi dengan tetap mengakui identitas minoritas. Oleh karena itu, proses akulturasi akan terjadi dan minoritas tetap pada hak dan tempat sebagaimana mereka mengharapkan cita-cita mereka khususnya dalam tempat dan rasa aman.

Rendahnya Partisipasi Perempuan Didalam Parlemen

Kesetaraan gender menjadi titik awal kebangkitan dan kemajuan suatu bangsa. Perempuan dalam hal ini perlu diberdayakan guna memainkan peran yang sama, seperti pria baik dalam hal ekonomi, politik, dan sosial. Upaya memberikan afirmasi terkait partisipasi perempuan dalam parlemen terus digencarkan sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam membangun demokratisasi. Partisipasi adalah sebuah kegiatan warga negara sebagai pribadi yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pembuatan keputusan pemerintah, dimana dalam hal ini menjadi bagian pokok demokrasi terutama pemilu, mengingat pesta rakyat tersebut menjadi mandat sebagai sarana untuk terjadinya perwakilan sebagai warga negara dalam pembuatan keputusan (Priandi & Roisah, 2019). Melalui hal ini maka partisipasi menjadi sebuah wadah masyarakat membawa kepentingan untuk diperjuangkan dengan harapan atau output sebuah kebijakan.

Rendahnya partisipasi perempuan dalam parlemen pada akhirnya mengindikasikan masih banyak pekerjaan rumah bagi pemerintah. Secara khusus perhatian sudah diberikan pemerintah dengan memberikan kuota 30 % untuk perempuan mengisi kursi parlemen. Namun, afirmasi ini belum sepenuhnya berjalan bahkan kuota tersebut belum pernah tercapai. Sejauh ini semenjak pemilu 1999-2019 tercatat hanya pada 2019 partisipasi perempuan mencapai titik paling tinggi mencapai 29,5 persen atau berjumlah 86 perempuan dari total 292 anggota parlemen. Dengan demikian, maksimalisasi mengenai partisipasi perempuan dalam ranah politik masih menjadi suatu hal yang harus diperhatikan guna melancarkan proses demokratisasi di Indonesia.

Penyebab kegagalan maksimalisasi partisipasi perempuan didalam parlemen disebabkan oleh dilematisasi didalam diri perempuan itu sendiri. Dalam arti lain perempuan mendapatkan tuntutan untuk mampu sama dan setara dengan laki-laki dalam segala hal, tetapi disisi lain perempuan mendapatkan tuntutan lain untuk tidak melupakan kodratnya sebagai perempuan (Priandi & Roisah, 2019). Selain itu, terdapat penyebab lainnya ialah perempuan tidak memilih perempuan saat pemilihan umum yang mana dalam hal ini memunculkan narasi bahwa perempuan belum sadar akan pentingnya perempuan

didalam parlemen. Terakhir ialah tingginya paradigma patriarki didalam ruang lingkup stereotif pemimpin. Meskipun masih banyak penyebab lain yang menjadi indikator kegagalan maksimalisasi partisipasi parlemen, tetapi tiga penyebab tersebut dirasa mampu mewakili penyebab utamanya.

Berdasarkan hal ini maka terdapat tantangan untuk memberdayakan perempuan secara optimal dan substansial. Melalui ini pula maka perlu ada sebuah tindakan konkrit untuk memaksimalkan peranan perempuan didalam kursi parlemen. Dalam hal ini perlu ada gerakan yang lahir dari perempuan itu sendiri yang mendorong kecenderungan pada pemberdayaan perempuan yang mana dalam hal ini adanya intensif bergerak dalam segala aspek, seperti politik, ekonomi, dan sosial yang mengarahkan pada upaya memperbaiki segmen didalam masyarakat (Sofiyah, 2007)

Selanjutnya dalam hal pendidikan politik menjadi sebuah solusi lain untuk meningkatkan partisipasi politik dengan advokasi terhadap kaum perempuan agar terpanggil kedalam ruang politik sehingga mendorong perempuan untuk berani ikut dalam partisipasi politik terutama perihal pengambilan keputusan atau kebijakan. (Priandi & Roisah, 2019). Maka proses demokratisasi dapat sepenuhnya terjadi dan berjalan optimal ketika memang kesetaraan terjadi didalam ruang keputusan kebijakan. Sejauh ini pergerakan akar rumput mengenai pemikiran feminisme dalam parlemen di Indonesia telah berkembang bahkan telah mengakar kedalam kajian-kajian Perempuan, Mahasiswa, dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Penulis percaya dengan pemberdayaan perempuan secara penuh maka partisipasi perempuan didalam politik akan menciptakan kesetaraan dan membawa kepentingan kelompok perempuan. Pemberdayaan perempuan tersebut melingkupi advokasi perempuan, pendidikan politik, dan propaganda diranah pergerakan mahasiswa. Bahkan sejauh ini perjuangan perempuan harus terus berjalan bukan sekedar memenuhi afirmasi yang diberikan pemerintah sebanyak 30 persen, tetapi 50 persen dimana ketika perempuan telah mengisi parlemen ada upaya dan potensi perubahan mengenai kuota perempuan didalam parlemen. Dengan demikian, emansipasi wanita telah berhasil diranah politik dengan bukti kebijakan publik ramah dan sensitif gender (Sari, 2020). Oleh karena itu, demokratisasi mengalami hambatan ketika tidak terjadinya kesetaraan gender didalam parlemen.

KESIMPULAN

Demokratisasi di Indonesia sedang berproses, mengingat pasca peristiwa reformasi tahun 98 secara garis besar mampu mengindikasikan adanya upaya menjalankan demokrasi secara utuh dengan penuh nilai dan esensi. Namun, agenda besar yang seharusnya berjalan dengan optimal mendapatkan gangguan dari pihak-pihak yang mencoba mengakomodir agenda besar ini, dalam hal ini terdapat beberapa hambatan demokratisasi di Indonesia, diantaranya feodalisme yang masih menghantui masyarakat Indonesia, kelompok minoritas belum mendapatkan jaminan hak dan tempat. Mengingat masih banyak kasus intoleransi yang mencederai demokrasi di Indonesia. Terakhir ialah rendahnya partisipasi perempuan diranah parlemen yang masih menjadi sorotan terutama perihal keberhasilan demokratisasi.

Sejauh ini ada banyak ancaman mengenai kegagalan demokratisasi di Indonesia, perlu kita ketahui ketika agenda besar ini tidak dijaga bukan tidak mungkin demokrasi yang dijalankan hanya sebatas prosedural, tetapi kehilangan basis argumentasi substansial dan rasionalitas tanpa membawa identitas. Maka kita perlu melakukan antisipasi dengan memberikan sebuah peringatan berupa identifikasi hambatan dan tantangan agar demokratisasi ini berjalan dengan maksimal. Hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan atau hambatan tersebut, diantaranya advokasi perempuan terutama perihal pemberdayaan, pendidikan politik, dan maksimalisasi gerakan akar rumput organisasi minoritas dan perempuan.

SARAN

Penulis memberikan saran untuk seluruh mahasiswa, akademisi, pengamat politik, dan partai politik untuk menjaga agenda besar demokratisasi di Indonesia. Mengingat dengan saling menjaga maka demokrasi dapat bekerja dan menghasilkan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat. Selain itu, adanya harapan penulis untuk bersinergi dalam melakukan advokasi perempuan khususnya mengenai pemberdayaan, mendorong pembuatan kajian yang dapat masuk kedalam *policy brief* mengenai perlindungan kelompok minoritas, dan melakukan aktivitas pendidikan politik.

DAFTAR PUSTAKA

<https://setara-institute.org/memahami-situasi-intoleransi/> (Diakses 25 Oktober 2022)

<https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/eN43rx1K-intoleransi-di-indonesia-capai-54-persen-ini-penyebabnya> (Diakses 25 Oktober 2022)

<https://pmb.brin.go.id/minoritas-masih-rentan-jadi-sasaran-kekerasan/> (Diakses 25 Oktober 2022)

<https://osf.io/qbu7w>

<https://ylbhi.or.id/informasi/berita/lbh-bandung-perlindungan-hukum-kaum-minoritas-masih-lemah/> (Diakses 25 Oktober 2022)

<https://tirto.id/kuota-30-perempuan-di-parlemen-belum- pernah-tercapai-cv8q> (Diakses 25 Oktober 2022)